

## ABSTRAKSI

Proses demokrasi di Rusia menyisakan intrik, polemik dan dilemma politis yang ambiguitas. Setelah memasuki masa keputusan demokrasi diawal tahun 1990-an, Rusia yang merupakan representatif Uni Soviet masa depan, dihadang segudang masalah komplek sehingga menyebabkan semakin tidak jelasnya kehidupan perpolitikan Republik federasi Russia. Konsep demokrasi yang diawali dengan pertentangan kubu moderat dengan komunis merah yang menyebabkan terjadinya koup 1993 yang dilakukan oleh Yeltsin dengan menyerang parlemen sekaligus membubarkannya sehingga menyebabkan Ketidakstabilan politik yang disertai dengan ambruknya perekonomian, kedua hal tersebut semakin memperparah *uncivility* social budaya masyarakat Rusia.

Perangkat demokrasi yang mulai diterapkan diawal terbentuknya Republik Federasi Rusia tidak berjalan sebagaimana mestinya, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana utama dalam pemerintahan terlalu dominan dalam menjalankan kewenangannya, sehingga proses *check and balance* dalam proses legislasi tidak pernah mencerminkan sistem demokrasi.

Superpresidensialisme merupakan kata yang tepat dalam merepresentasikan kekuasaan eksekutif. Superpresidensialisme di bawah rezim Yeltsin mulai menggeliat dalam perpolitikan Rusia dimulai dengan pembubaran parlemen tahun 1993 dan sekaligus mengamandemen undang-undang secara sepihak sehingga undang-undang yang dibuat memberikan ruang yang besar terhadap kekuasaan presiden. Pemberian ruang yang besar terhadap kekuasaan presiden menyebabkan lemahnya aspek-aspek demokrasi yang ada, keberadaan trias politika secara kelembagaan tidak berfungsi dengan baik, *Civil Liberties* yang terkontrol, *Civil Society* yang lemah dll. Keadaan yang memperlemah demokratisasi tersebut semakin tenggelam dikarenakan kelembaman kebudayaan politik masyarakat Rusia yang masih terkukung oleh budaya authoritarian dan komunisme yang sudah mendarah daging, sehingga menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat pada umumnya untuk bisa berperan aktif dalam peranan